

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal melalui Penguatan UMKM, Ketahanan Pangan, dan Kelestarian Lingkungan di Desa Bojongemas, Kecamatan Solokanjeruk

Saisa Briyanti¹, Gina Pertiwi², Devi Dania³, Aulia Rahmah Nurojanah⁴, Audina Shifa Azahra⁵, Nur Afifah Adilah⁶, Andre Haiqal⁷, Arif Mochamad Rifan⁸, Muhammad Rivalsyah⁹, Cici Salsa Rizqiyani¹⁰, Octavia Chandra Dewi¹¹, Muhammad Suryanuddin¹²

Hubungan Internasional¹, Sistem Informasi², Teknologi Pangan³, Manajemen⁴, Farmasi⁵, Sastra Inggris⁶, Administrasi Negara⁷, Manajemen⁸, Administrasi Negara⁹, Administrasi Negara¹⁰, Sastra Inggris¹¹, Sistem Informasi¹²

Ilmu Sosial dan Politik¹, Teknologi Informasi², Teknologi Pertanian³, Ekonomi⁴, Fakultas Matematika Ilmu Alam⁵, Sastra⁶, Ilmu Sosial dan Politik⁷, Ekonomi⁸, Ilmu Sosial dan Politik⁹, Ilmu Sosial dan Politik¹⁰, Sastra¹¹, Teknologi Informasi¹²
Universitas Al-Ghifari^{1,2,3, Dst.,}

Email Author: saisabriyanti19@gmail.com¹, 19ginapertiwi@gmail.com², devidania14052@gmail.com³, rmhn003@gmail.com⁴, audinaazahra0@gmail.com⁵, afifahadilahnur@gmail.com⁶, andrehaiqal22@gmail.com⁷, rifan7060@gmail.com⁸, rivalsps32@gmail.com⁹, cicisalahrizqiyani@gmail.com¹⁰, octaviachandra@unfari.ac.id¹¹, suryanuddin@unfari.ac.id¹²

Abstrak

Kata Kunci:
Pemberdayaan Masyarakat, UMKM Potensi Lokal, Ketahanan Pangan, Kelestarian Lingkungan

Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal merupakan strategi penting dalam mendorong kemandirian ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Bojongemas, Kecamatan Solokanjeruk, dengan fokus utama pada penguatan UMKM serta ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan sebagai program pendukung. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kelompok KKN Tematik Sagara Karsa Universitas Al-Ghifari yang beranggotakan 10 mahasiswa selama satu bulan. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penguatan UMKM menyasar sembilan pelaku usaha lokal melalui pendataan, pendampingan legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB), fasilitasi sertifikasi halal, edukasi higiene produksi, serta digitalisasi sistem pembayaran menggunakan QRIS. Sementara itu, program pendukung diwujudkan melalui Aksi Dapur Lestari dengan penyemaian 1.000 bibit tanaman hortikultura untuk mengoptimalkan lahan pekarangan rumah tangga, serta aksi penanaman pohon dan gotong royong bersama warga dan Satgas Citarum Harum. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa intervensi program berhasil meningkatkan pengetahuan, kapasitas, dan kesiapan masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi, pangan, dan lingkungan desa secara mandiri. Keberlanjutan keberhasilan program ini membutuhkan pendampingan pascaprogram serta kolaborasi sinergis yang kuat antara perguruan tinggi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lokal.

Abstrack

Key Word:
Community Empowerment, MSMEs Local Potential, Food Security, Environmental Sustainability

Community empowerment based on local potential serves as a crucial strategy for fostering economic self-reliance and achieving sustainable development at the village level. This community service activity aims to comprehensively describe the implementation of an empowerment program in Bojongemas Village, Solokanjeruk District, focusing on strengthening micro, small, and medium enterprises (MSMEs) as the main initiative, complemented by food security and environmental sustainability programs. Conducted by the Sagara Karsa Thematic Service-Learning Group from Al-Ghifari University, consisting of 10 university students over a one-month period, this study employs a descriptive qualitative approach with data collected through field observation, in-depth interviews, and documentation. The MSME strengthening program targeted nine local business owners through data mapping, assistance with Business Identification Numbers (NIB), halal certification facilitation, production hygiene education, and payment digitalization using QRIS. Furthermore, supporting programs included the Sustainable Kitchen Action preparing 1,000 horticultural seedlings to optimize household yard utilization along with tree planting and clean-up activities in collaboration with residents and the Citarum Harum Task Force. The results indicate that the program successfully improved community knowledge, capacity, and readiness to manage local economic, food, and environmental potential independently. Ensuring long-term program sustainability requires continuous post-program mentoring and strong synergistic collaboration among universities, local residents, and village stakeholders.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam mengenali, mengembangkan, dan mengelola potensi yang dimiliki di lingkungannya. Pemberdayaan berbasis potensi lokal tidak hanya berorientasi pada peningkatan kondisi ekonomi, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan. Potensi lokal dapat berupa sumber daya alam, keterampilan masyarakat, aktivitas ekonomi, maupun sumber daya sosial yang berkembang dalam suatu wilayah. Oleh karena itu, pengembangan potensi lokal perlu dilakukan melalui proses yang melibatkan masyarakat secara aktif sehingga program yang dilaksanakan memiliki kesesuaian dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah. (Anggara & Rezki, 2023) menunjukkan bahwa pemberdayaan berbasis potensi lokal dapat menjadi pendekatan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan sumber daya yang tersedia di wilayahnya. Penelitian mengenai pemberdayaan berbasis potensi lokal juga menunjukkan bahwa penguatan pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam menciptakan kemandirian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Prasetya & Rahaju, 2024).



*Gambar 1. Pembukaan KKN Tematik
Berdampak Kelompok Sagara Karsa di Desa*

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan potensi lokal melalui keterlibatan masyarakat dalam mengenali kebutuhan, mengembangkan kapasitas, serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungannya. Dalam konteks perguruan tinggi, pengabdian kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) menjadi salah satu bentuk implementasi tridharma yang mempertemukan kapasitas akademik mahasiswa dengan kebutuhan nyata masyarakat. Melalui KKN, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pelaksana program, tetapi juga melakukan identifikasi terhadap potensi dan permasalahan masyarakat sebagai dasar dalam merancang kegiatan yang sesuai dengan kondisi lokal. Pendekatan tersebut diterapkan dalam KKN Tematik Berdampak Universitas Al-Ghifari yang dilaksanakan oleh Kelompok Sagara Karsa di Desa Bojongemas, Kecamatan Solokanjeruk. Kelompok ini terdiri atas 10 mahasiswa dan melaksanakan kegiatan selama satu bulan, yaitu pada 13 Juli hingga 14 Agustus 2026. Berdasarkan hasil observasi dan identifikasi kondisi masyarakat selama pelaksanaan KKN, ditemukan sejumlah potensi yang dapat dikembangkan melalui kegiatan pemberdayaan, terutama pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pemanfaatan lahan rumah tangga dan lingkungan. Kondisi tersebut kemudian menjadi dasar bagi Kelompok Sagara Karsa dalam menyusun penguatan UMKM sebagai program utama, yang dilengkapi dengan Aksi Dapur Lestari dan kegiatan kelestarian lingkungan sebagai program pendukung, sehingga pelaksanaan pengabdian diarahkan pada pemanfaatan potensi lokal untuk mendukung pemberdayaan masyarakat Desa Bojongemas.

Salah satu potensi yang menjadi sasaran utama kegiatan pemberdayaan di Desa Bojongemas adalah sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berdasarkan hasil pendataan dan identifikasi lapangan yang dilakukan oleh Kelompok KKN Sagara Karsa, ditemukan pelaku UMKM dengan jenis usaha yang beragam, mulai dari produk pangan olahan hingga usaha makanan siap konsumsi dan perdagangan. Keberagaman tersebut menunjukkan adanya potensi ekonomi masyarakat yang dapat dikembangkan, tetapi pada saat yang sama terdapat kebutuhan terhadap pendampingan administratif, legalitas, jaminan kehalalan produk, serta adaptasi terhadap perkembangan sistem pembayaran digital. Dokumentasi kegiatan KKN Sagara Karsa menunjukkan bahwa pendataan UMKM dilakukan sebagai tahap awal untuk mengidentifikasi pelaku usaha dan membantu memahami kebutuhan administrasi dalam proses legalisasi usaha serta pengajuan sertifikasi halal. Para pelaku usaha juga memberikan respons positif terhadap pendampingan karena memperoleh pemahaman mengenai tahapan administrasi yang sebelumnya belum sepenuhnya mereka pahami.

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, sembilan pelaku UMKM menjadi sasaran pendampingan dengan bentuk intervensi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing usaha. Pendampingan sertifikasi halal dilakukan kepada Bu Ade sebagai pelaku usaha kicimpring, Bu Hasanah sebagai pelaku usaha rengginang, Pak Udin Wahyudin sebagai pelaku usaha rengginang dan rengginang, serta Bu Yani sebagai pelaku usaha jajanan kaki lima. Pendampingan NIB dan sertifikasi halal diberikan kepada Bu Hasanah dan Pak Udin Wahyudin, sedangkan pendampingan digitalisasi pembayaran melalui QRIS diberikan kepada Bu Dea sebagai pelaku usaha cireng, Pak Panji sebagai pelaku usaha chicken, Pak Yogi sebagai pelaku toko oleh-oleh, Bu Rika sebagai pelaku usaha bakso gerobak, dan Bu Inoy sebagai pelaku usaha seblak. Dengan demikian, penguatan UMKM dalam kegiatan ini tidak dilakukan melalui satu bentuk pendampingan yang seragam, melainkan berdasarkan kebutuhan dan kondisi masing-masing pelaku usaha. Pendekatan tersebut sejalan dengan kegiatan pengabdian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pendampingan legalitas dan sertifikasi halal dapat membantu pelaku UMKM memahami proses administrasi serta meningkatkan kesiapan usaha untuk berkembang.

Aspek sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi UMKM pangan karena memberikan jaminan mengenai status kehalalan produk sekaligus mendukung kesiapan usaha dalam menghadapi tuntutan konsumen. Kegiatan pengabdian yang dilakukan (Lastfitriani et al., 2024) menunjukkan bahwa pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM makanan dan minuman dapat dilakukan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Program tersebut menunjukkan bahwa pendampingan dapat membantu meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai proses sertifikasi serta mendorong peningkatan kualitas dan akses pasar produk. Temuan tersebut relevan dengan kegiatan KKN Sagara Karsa karena empat pelaku UMKM Desa Bojongemas mendapatkan pendampingan sertifikasi halal sebagai bagian dari penguatan kapasitas usaha. Selain itu, pendampingan NIB kepada dua pelaku UMKM juga menjadi bagian dari penguatan aspek formalitas usaha. (Raehanah et al., 2024) menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB dapat dilakukan secara bersamaan dengan edukasi sertifikasi halal untuk membantu pelaku UMKM memenuhi kebutuhan legalitas dan persyaratan usaha.

Selain aspek legalitas dan sertifikasi halal, penguatan UMKM Desa Bojongemas juga diarahkan pada pemanfaatan teknologi pembayaran digital melalui QRIS. Perkembangan transaksi digital memberikan peluang bagi usaha skala mikro untuk menyediakan alternatif pembayaran yang lebih praktis bagi konsumen. Namun, penerapan teknologi tersebut tetap membutuhkan pemahaman dan pendampingan, terutama bagi pelaku usaha yang belum terbiasa menggunakan sistem pembayaran digital. Kegiatan pengabdian mengenai digitalisasi UMKM melalui QRIS menunjukkan bahwa pendampingan teknologi dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan literasi digital masyarakat dan membantu pelaku usaha beradaptasi dengan perkembangan ekonomi digital (Nugroho et al., 2023). Kondisi tersebut ditemukan pula dalam kegiatan Sagara Karsa, ketika sejumlah pelaku usaha mengaku baru pertama kali memperoleh pendampingan secara langsung dalam proses pembuatan QRIS. Pendampingan dilakukan dengan pendekatan komunikatif dan praktik langsung sehingga pelaku usaha dapat memahami penggunaan QRIS sebagai salah satu sarana pembayaran dalam kegiatan usahanya.

Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan KKN Sagara Karsa tidak hanya diarahkan pada potensi ekonomi melalui UMKM, tetapi juga diperluas melalui program pendukung Aksi Dapur Lestari yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan pemanfaatan lingkungan rumah tangga. Aksi Dapur Lestari dilaksanakan melalui proses penyemaian dan persiapan bibit tanaman yang ditujukan untuk mendukung pemanfaatan lahan masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk pemanfaatan potensi lahan yang

tersedia di lingkungan rumah agar dapat digunakan untuk kegiatan budidaya tanaman. Dalam pelaksanaannya, Kelompok Sagara Karsa melakukan penyemaian bibit sebagai tahap awal sebelum tanaman dirawat hingga masa panen dan hasilnya direncanakan untuk dibagikan kepada masyarakat Desa Bojongemas. Dokumentasi kegiatan menunjukkan bahwa program tersebut tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan tanaman, tetapi juga menjadi sarana edukasi mengenai pentingnya proses penyemaian dan budidaya tanaman sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan.

Pemanfaatan lahan rumah tangga untuk mendukung ketahanan pangan memiliki relevansi dengan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya. (Radita et al., 2025), misalnya, menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan pekarangan rumah dapat diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan tanaman yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Kegiatan pengabdian di Desa Gadingsari juga menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan pekarangan dapat menjadi bentuk kontribusi masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan keluarga melalui kegiatan budidaya tanaman di lingkungan rumah (Saputro & Fidiyani, 2022). Dengan demikian, Aksi Dapur Lestari dalam kegiatan KKN Sagara Karsa dapat dipahami sebagai program pendukung pemberdayaan yang menghubungkan pemanfaatan potensi lingkungan rumah tangga dengan upaya membangun kesadaran dan praktik ketahanan pangan masyarakat.

Aspek kelestarian lingkungan juga menjadi bagian dari rangkaian pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kelompok Sagara Karsa. Kegiatan lingkungan dilaksanakan melalui keterlibatan mahasiswa bersama masyarakat serta koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya menjaga lingkungan sekitar. Dokumentasi KKN menunjukkan adanya kolaborasi dengan Posko Sektor 2 Satgas Citarum Harum dalam rencana aksi penanaman pohon serta kegiatan gotong royong bersama masyarakat. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya dapat diarahkan pada peningkatan kapasitas ekonomi, tetapi juga pada pembentukan partisipasi dan kepedulian terhadap lingkungan. Integrasi aspek ekonomi, pangan, dan lingkungan menjadi penting karena potensi lokal yang dimanfaatkan untuk pemberdayaan perlu dikelola dengan mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya yang tersedia. Pendekatan pemberdayaan berbasis potensi lokal juga telah menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi masyarakat dapat berjalan bersamaan dengan upaya menjaga sumber daya dan lingkungan apabila masyarakat dilibatkan sebagai aktor utama dalam prosesnya (Anggara & Rezki, 2023).

Meskipun berbagai kegiatan pengabdian sebelumnya telah membahas pendampingan UMKM melalui sertifikasi halal, legalitas usaha, digitalisasi, maupun pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan, kegiatan pemberdayaan yang mengintegrasikan penguatan UMKM sebagai program utama dengan ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan sebagai program pendukung dalam satu konteks potensi lokal desa masih memiliki ruang untuk didokumentasikan secara lebih kontekstual. Kegiatan KKN Sagara Karsa di Desa Bojongemas memiliki karakteristik tersebut melalui penggabungan pendataan dan pendampingan UMKM, fasilitasi sertifikasi halal dan NIB, digitalisasi pembayaran melalui QRIS, serta Aksi Dapur Lestari dan kegiatan lingkungan. Oleh karena itu, artikel ini tidak diarahkan untuk menguji pengaruh atau hubungan antarvariabel, melainkan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan pemberdayaan, bentuk pendampingan yang diberikan, potensi lokal yang dikembangkan, serta hasil pelaksanaan kegiatan berdasarkan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran pengabdian.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan yang menjadi dasar kegiatan pengabdian adalah bagaimana potensi lokal masyarakat Desa Bojongemas dapat dikembangkan melalui kegiatan pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya pada sektor UMKM, ketahanan pangan, dan kelestarian lingkungan. Secara khusus, kegiatan ini diarahkan untuk mendeskripsikan pelaksanaan penguatan UMKM melalui pendampingan sertifikasi halal, NIB, dan QRIS sebagai program utama, serta menggambarkan pelaksanaan Aksi Dapur Lestari dan kegiatan lingkungan sebagai program pendukung. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah mendeskripsikan upaya pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal di Desa Bojongemas melalui penguatan kapasitas UMKM serta pemanfaatan potensi lingkungan untuk mendukung ketahanan pangan dan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan. Hasil pengabdian diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dalam mengoptimalkan potensi lokal serta menjadi referensi bagi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis KKN di wilayah perdesaan.

No	Input	Process	Output	Outcome
1.	Potensi UMKM, lahan rumah tangga dan lingkungan	Penguatan UMKM: NIB, sertifikasi halal, QRIS	9 UMKM mendapat pendampingan	Meningkatnya kapasitas dan kesiapan UMKM
2.	Kebutuhan masyarakat	Aksi Dapur Lestari: Penyemaian 1000 bibit	1000 bibit disiapkan	Optimalisasi lahan untuk ketahanan pangan
3.	10 anggota mahasiswa KKN dan dukungan Pokja, Karang Taruna, PKK, TNI	Kegiatan Lingkungan: permanen dan gotong royong	Kegiatan lingkungan terlaksana	Meningkatnya kesadaran lingkungan warga Desa Bojongemas

Tabel tersebut menggambarkan kerangka pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat KKN Universitas Al-Ghifari Sagara Karsa di Desa Bojongemas dengan pendekatan Input–Process–Output–Outcome. Pada aspek input, kegiatan didasarkan pada potensi UMKM, lahan rumah tangga, dan lingkungan, serta kebutuhan masyarakat yang didukung oleh 10 mahasiswa KKN dan stakeholder terkait. Selanjutnya, pada tahap process, potensi dan kebutuhan tersebut ditindaklanjuti melalui tiga bentuk kegiatan, yaitu penguatan UMKM melalui pendampingan NIB, sertifikasi halal, dan QRIS; Aksi Dapur Lestari melalui penyemaian 1.000 bibit; serta kegiatan lingkungan melalui penanaman dan gotong royong.

Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan output berupa pendampingan terhadap 9 UMKM, tersedianya 1.000 bibit untuk mendukung Aksi Dapur Lestari, serta terlaksananya kegiatan lingkungan bersama masyarakat. Selanjutnya, outcome yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya kapasitas dan kesiapan pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya, optimalisasi pemanfaatan lahan rumah tangga untuk mendukung ketahanan pangan, serta meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa Bojongemas dalam menjaga lingkungan. Dengan demikian, keseluruhan rangkaian kegiatan menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal sebagai dasar kegiatan, sementara penguatan UMKM menjadi program utama dan ketahanan pangan serta kelestarian lingkungan menjadi program pendukung untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

PENDEKATAN LAPANGAN

3.1 Metode Penelitian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan proses pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal serta hasil pelaksanaan program di Desa Bojongemas, Kecamatan Solokanjeruk. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami kondisi masyarakat, proses pelaksanaan program, bentuk partisipasi, serta pengalaman masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan secara kontekstual. Penggunaan pendekatan deskriptif kualitatif dalam pemberdayaan masyarakat memungkinkan kondisi lapangan dan bentuk pemberdayaan dianalisis berdasarkan informasi yang diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Chelsea & Suryasih, 2021).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengidentifikasi kondisi awal, potensi, kebutuhan, serta keterlibatan masyarakat selama pelaksanaan kegiatan. Wawancara dilakukan kepada pelaku UMKM dan masyarakat yang terlibat untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan usaha, pemahaman terhadap program, serta respons terhadap pendampingan yang diberikan. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa foto kegiatan, catatan lapangan, data UMKM, dan dokumentasi pelaksanaan program. Penggunaan kombinasi observasi, wawancara, dan dokumentasi relevan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang menempatkan kondisi dan partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dalam proses pelaksanaan program (Chelsea & Suryasih, 2021).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Kelompok KKN Sagara Karsa yang terdiri atas 10 mahasiswa selama satu bulan di Desa Bojongemas. Program utama diarahkan pada penguatan UMKM

dengan sasaran sembilan pelaku usaha melalui pendataan, pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, serta pengenalan pembayaran digital melalui QRIS. Pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha agar aspek legalitas, kehalalan produk, dan pemanfaatan teknologi pembayaran dapat dipahami dan diterapkan dalam kegiatan usaha. Pendekatan tersebut sejalan dengan (Damayanti et al., 2025) yang menerapkan pendampingan sertifikasi halal dan QRIS kepada UMKM melalui desain kualitatif dan menemukan bahwa pendampingan dapat mendukung kesiapan UMKM dalam aspek sertifikasi serta transformasi digital.

Selain penguatan UMKM sebagai program utama, kegiatan pengabdian dilengkapi dengan Aksi Dapur Lestari dan kegiatan kelestarian lingkungan sebagai program pendukung. Aksi Dapur Lestari dilakukan melalui penyemaian dan persiapan 1.000 bibit yang diarahkan untuk dimanfaatkan masyarakat dalam mengoptimalkan lahan rumah tangga sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan. Pemanfaatan lahan rumah tangga melalui kegiatan budidaya, pendampingan, dan pengelolaan tanaman dapat menjadi salah satu bentuk pemberdayaan untuk mendukung kemandirian pangan masyarakat (Qomariyah et al., 2022). Kegiatan lingkungan dilaksanakan melalui penanaman dan gotong royong bersama masyarakat serta pihak terkait untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Tingkat ketercapaian kegiatan dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan kesesuaian antara rencana program, proses pelaksanaan, output, dan hasil yang teridentifikasi di lapangan. Indikator ketercapaian meliputi terlaksananya pendataan dan pendampingan terhadap sembilan UMKM, fasilitasi NIB dan sertifikasi halal, pengenalan QRIS, tersedianya 1.000 bibit untuk Aksi Dapur Lestari, serta terlaksananya kegiatan lingkungan. Selain ketercapaian output, evaluasi dilakukan dengan mengamati partisipasi, respons, pemahaman, dan kesiapan masyarakat selama kegiatan berlangsung. Dengan demikian, keberhasilan program tidak ditentukan melalui uji pengaruh atau hubungan antarvariabel, tetapi melalui deskripsi proses, ketercapaian kegiatan, dan temuan lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal

Kegiatan pengabdian Kelompok KKN Sagara Karsa dilaksanakan di Desa Bojongemas, Kecamatan Solokanjeruk melalui pendekatan pemberdayaan yang menempatkan kondisi dan potensi masyarakat sebagai dasar pelaksanaan program. Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa potensi masyarakat tidak hanya berada pada sektor ekonomi melalui keberadaan UMKM, tetapi juga pada pemanfaatan lahan rumah tangga dan kepedulian terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pelaksanaan program diarahkan pada penguatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan yang bersifat praktis dan pendampingan langsung. Pendekatan tersebut sesuai dengan karakteristik pemberdayaan masyarakat yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, komunikasi, observasi lapangan, dan pendampingan dalam memahami kebutuhan serta potensi lokal (Chelsea & Suryasih, 2021).

Berdasarkan hasil studi kasus dan wawancara lapangan, program utama diarahkan pada penguatan UMKM, sedangkan Aksi Dapur Lestari dan kegiatan lingkungan ditempatkan sebagai program pendukung. Sebanyak 9 pelaku UMKM menjadi sasaran pendampingan dengan karakteristik usaha yang beragam, meliputi kicimpring, rengginang, renggining, jajanan kaki lima, cireng, chicken, toko oleh-oleh, bakso gerobak, dan seblak. Pendampingan dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing pelaku usaha, terutama dalam aspek legalitas, sertifikasi halal, dan digitalisasi pembayaran. Model pendampingan semacam ini relevan dengan studi pengabdian UMKM yang menunjukkan bahwa pendekatan langsung melalui observasi, wawancara, sosialisasi, dan pendampingan dapat membantu pelaku usaha memahami kebutuhan legalitas dan pengembangan usaha (Husen et al., 2025).



Gambar 2 Pendataan dan Identifikasi UMKM Desa Bojongemas sebagai tahap awal pendampingan.

Dokumentasi pendataan menunjukkan bahwa proses pemberdayaan dimulai dengan mengenali karakteristik usaha dan kebutuhan administrasi masing-masing pelaku UMKM. Kegiatan pendataan dilakukan secara langsung dengan mengunjungi pelaku usaha dan mengidentifikasi jenis produk, proses produksi, serta dokumen yang diperlukan untuk mendukung pengurusan NIB dan sertifikasi halal. Tahap ini penting karena pemberdayaan tidak dapat dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi awal masyarakat sasaran. Dokumentasi kegiatan KKN Sagara Karsa juga mencatat bahwa pendataan menjadi tahap awal dalam pendampingan legalitas usaha dan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Desa Bojongemas.

4.2 Penguatan UMKM melalui Legalitas Usaha dan Sertifikasi Halal

Salah satu hasil utama kegiatan adalah terlaksananya pendampingan legalitas bagi pelaku UMKM. Dari sembilan pelaku usaha yang menjadi sasaran, Bu Ade sebagai pelaku usaha kicimpring memperoleh pendampingan sertifikasi halal; Bu Hasanah sebagai pelaku usaha rengginang memperoleh pendampingan NIB dan sertifikasi halal; Pak Udin Wahyudin sebagai pelaku usaha rengginang dan rengginang memperoleh pendampingan NIB dan sertifikasi halal; sedangkan Bu Yani sebagai pelaku usaha jajanan kaki lima memperoleh pendampingan sertifikasi halal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tidak berhenti pada pemberian informasi, tetapi diarahkan pada pendampingan administratif sesuai kebutuhan masing-masing usaha. Pendampingan NIB dan sertifikasi halal penting karena keterbatasan pengetahuan dan kelengkapan persyaratan sering menjadi hambatan bagi pelaku UMK dalam memperoleh legalitas usaha (Nora et al., 2024).



Gambar 3 Pendataan dan pendampingan administrasi NIB serta sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Sumber: Dokumentasi KKN Sagara Karsa, 2026.

Pendampingan sertifikasi halal juga dilakukan melalui pengamatan terhadap proses produksi salah satu UMKM. Mahasiswa terlibat dalam proses persiapan bahan, pengolahan, hingga pengemasan produk untuk memahami dan mendokumentasikan proses produksi yang berkaitan dengan kebutuhan pengajuan sertifikasi halal. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pendampingan legalitas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan dengan pemahaman pelaku usaha mengenai kebersihan, sanitasi, bahan baku, dan konsistensi proses produksi. Pola ini sejalan dengan (Cahyani et al., 2024), yang menunjukkan bahwa pendampingan secara langsung dalam proses sertifikasi halal dapat membantu UMKM memenuhi tahapan administrasi dan persyaratan sertifikasi.



Gambar 4 Pendampingan proses produksi UMKM sebagai bagian dari persiapan sertifikasi halal. Sumber: Dokumentasi KKN Sagara Karsa, 2026.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program pada aspek sertifikasi halal perlu dipahami sebagai ketercapaian proses pendampingan dan kesiapan administratif, bukan semata-mata penerbitan sertifikat. Berdasarkan dokumentasi yang tersedia, kegiatan telah membantu pelaku usaha memahami tahapan dan kebutuhan dokumen dalam proses sertifikasi halal, tetapi penerbitan sertifikat akhir perlu dibedakan dari tahap pendampingan. Hal ini penting karena pengalaman program pengabdian lain menunjukkan bahwa kelengkapan persyaratan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengajuan NIB dan sertifikasi halal (Nora et al., 2024). Dengan demikian, luaran program di Desa Bojongemas lebih tepat dinyatakan sebagai peningkatan kesiapan legalitas dan pendampingan proses pengajuan, sementara keberlanjutan proses sertifikasi masih memerlukan pemantauan setelah kegiatan KKN berakhir.

4.3 Digitalisasi Pembayaran melalui QRIS

Selain aspek legalitas, penguatan UMKM dilakukan melalui pengenalan dan pendampingan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai sarana pembayaran digital. Pendampingan dilakukan secara langsung kepada pelaku usaha dengan memberikan edukasi mengenai manfaat pembayaran digital serta membantu proses pendaftaran hingga kode pembayaran dapat digunakan. Dokumentasi KKN Sagara Karsa menunjukkan bahwa kegiatan dilakukan secara langsung kepada berbagai jenis usaha dan mendapatkan respons positif dari pelaku UMKM yang sebelumnya belum memperoleh pendampingan langsung dalam pembuatan QRIS.

Penerapan QRIS diharapkan dapat meningkatkan kemudahan dan efisiensi transaksi bagi pelaku UMKM maupun konsumen. Penggunaan pembayaran digital juga memberikan alternatif transaksi yang lebih praktis, cepat, dan aman, sekaligus mendukung perluasan akses UMKM terhadap ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Bank Indonesia menyatakan bahwa QRIS dikembangkan sebagai standar pembayaran berbasis *QR Code* yang dapat digunakan oleh berbagai penyedia jasa pembayaran, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi secara nontunai. Bagi pelaku UMKM, penggunaan QRIS dapat menjadi salah satu bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi pembayaran dan mendukung digitalisasi kegiatan usaha (Bank Indonesia, 2024). Dengan demikian, pendampingan QRIS dalam kegiatan KKN tidak hanya berorientasi pada penyediaan sarana pembayaran

digital, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital.



Gambar 5 Pendampingan pendaftaran dan penggunaan QRIS bagi pelaku UMKM Desa Bojongemas. Sumber: Dokumentasi KKN Sagara Karsa, 2026

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa QRIS dapat menjadi instrumen sederhana untuk memperkenalkan digitalisasi transaksi kepada pelaku usaha mikro. Dalam konteks Desa Bojongemas, digitalisasi tidak diarahkan sebagai perubahan besar dalam model bisnis, tetapi sebagai langkah praktis untuk mempermudah transaksi dan memperkenalkan pelaku usaha kepada ekosistem pembayaran digital. Temuan ini sejalan dengan (Damayanti et al., 2025), yang menggunakan desain kualitatif dalam pendampingan sertifikasi halal dan implementasi QRIS pada UMKM dan melaporkan penerimaan positif terhadap QRIS serta manfaatnya dalam efisiensi transaksi dan transparansi keuangan.



Gambar 6 QRIS sebagai luaran digitalisasi pembayaran pada UMKM Desa Bojongemas. Sumber: Dokumentasi KKN Sagara Karsa, 2026.

Dari sisi pemberdayaan, penggunaan QRIS menunjukkan bahwa pendampingan UMKM dapat diarahkan tidak hanya pada pemenuhan legalitas, tetapi juga pada peningkatan kesiapan menghadapi perubahan pola transaksi. Keunggulan program terletak pada metode pendampingan langsung yang

memungkinkan mahasiswa menyesuaikan penjelasan dengan kemampuan masing-masing pelaku usaha. Namun, keterbatasannya adalah keberhasilan pembuatan QRIS belum secara otomatis menunjukkan peningkatan omzet atau perluasan pasar karena penelitian ini tidak melakukan pengukuran penjualan sebelum dan sesudah program. Oleh karena itu, luaran yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penelitian ini adalah terlaksananya pendampingan dan tersedianya sarana pembayaran digital, bukan klaim peningkatan pendapatan UMKM. Temuan tersebut konsisten dengan pendekatan evaluasi pengabdian berbasis proses yang membedakan antara output kegiatan dan dampak ekonomi jangka panjang (Damayanti et al., 2025).

4.4 Aksi Dapur Lestari sebagai Program Pendukung Ketahanan Pangan

Program pendukung berikutnya adalah Aksi Dapur Lestari yang diarahkan pada pemanfaatan lahan rumah tangga dan penguatan ketahanan pangan masyarakat. Kegiatan dilaksanakan melalui proses penyemaian dan persiapan 1.000 bibit tanaman hortikultura, antara lain selada keriting, selada lettuce, cabai keriting, cabai rawit, kol, kangkung, dan bayam. Bibit dipersiapkan untuk dirawat dan dikembangkan sebelum dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Bojongemas. Dokumentasi kegiatan menunjukkan bahwa penyemaian merupakan tahap awal program dan bibit yang tumbuh direncanakan untuk dirawat hingga masa panen sebelum dibagikan kepada masyarakat.



Gambar 7 Proses penyemaian bibit dalam program Aksi Dapur Lestari. Sumber: Dokumentasi KKN Sagara Karsa, 2026.

Dari perspektif pemberdayaan, penyemaian bibit tidak hanya menghasilkan luaran berupa tanaman, tetapi juga memberikan pengalaman praktis mengenai proses budidaya dan pemanfaatan lahan. Program ini memperlihatkan bahwa ketahanan pangan dapat diperkenalkan melalui kegiatan sederhana yang dapat dilakukan pada skala rumah tangga. Hasil tersebut sejalan dengan (Qomariyah et al., 2022), yang menunjukkan bahwa kegiatan urban farming melalui sosialisasi, pelatihan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi dapat mendorong kemampuan masyarakat dalam membudidayakan tanaman dan mendukung kemandirian pangan keluarga.



Gambar 8 Bibit hasil penyemaian luaran awal Aksi Dapur Lestari. Sumber: Dokumentasi KKN Sagara Karsa, 2026.

Meskipun demikian, ketercapaian Aksi Dapur Lestari perlu dipahami secara proporsional. Tersedianya 1.000 bibit merupakan output kegiatan, sedangkan peningkatan ketahanan pangan masyarakat merupakan outcome jangka menengah atau panjang yang belum dapat dibuktikan selama periode KKN satu bulan. Oleh karena itu, hasil yang dapat disimpulkan adalah program telah menyediakan sarana awal untuk pemanfaatan lahan dan memperkenalkan proses budidaya kepada masyarakat. Keberlanjutan program sangat bergantung pada pemeliharaan bibit, keterlibatan masyarakat, pemanfaatan lahan, serta keberhasilan tanaman hingga masa panen. Pendekatan semacam ini penting karena program pemberdayaan berbasis pangan membutuhkan pendampingan dan keberlanjutan setelah kegiatan awal selesai (Qomariyah et al., 2022).

4.5 Kelestarian Lingkungan dan Kolaborasi Masyarakat

Kegiatan kelestarian lingkungan menjadi program pendukung yang memperluas cakupan pemberdayaan dari aspek ekonomi dan pangan menuju kepedulian terhadap lingkungan. Kegiatan dilakukan melalui penanaman, gotong royong, serta koordinasi dengan pihak terkait, termasuk Posko Sektor 2 Satgas Citarum Harum. Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan lingkungan tidak hanya mengandalkan mahasiswa, tetapi melibatkan unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lokal. Dokumentasi KKN Sagara Karsa menunjukkan bahwa koordinasi dengan Satgas Citarum Harum dilakukan untuk menyusun rencana aksi penanaman pohon sebagai bagian dari kegiatan pelestarian lingkungan di Desa Bojongemas.



Gambar 9 Koordinasi Kelompok Sagara Karsa dengan Posko 2 Sektor Satgas Citarum Harum. Sumber: Dokumentasi KKN Sagara Karsa, 2026.

Dari hasil pengamatan, kegiatan lingkungan memiliki keunggulan dalam membangun interaksi dan partisipasi masyarakat karena dilakukan melalui aktivitas bersama seperti penanaman dan gotong royong. Dalam pemberdayaan masyarakat, keterlibatan masyarakat menjadi unsur penting karena keberlanjutan program tidak dapat hanya bergantung pada pihak pelaksana. Penelitian kualitatif mengenai pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa komunikasi, keterlibatan, dan pendampingan secara intensif menjadi faktor penting dalam membangun keberlanjutan program di tingkat lokal (Chelsea & Suryasih, 2021). Dengan demikian, kegiatan lingkungan Kelompok Sagara Karsa dapat dipandang sebagai upaya membangun kepedulian dan partisipasi masyarakat, meskipun dampak ekologis jangka panjangnya memerlukan pemantauan lebih lanjut.

Selain memberikan manfaat ekologis, kegiatan penanaman dan penghijauan juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran serta rasa memiliki masyarakat terhadap lingkungan di sekitar tempat tinggalnya. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan lingkungan menjadi penting karena masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pihak yang dapat melanjutkan pemeliharaan lingkungan setelah program selesai. (Tanjung et al., 2023) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi merupakan faktor penting dalam mendukung pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan penanaman yang dilaksanakan Kelompok Sagara Karsa dapat menjadi langkah awal dalam membangun tindakan kolektif masyarakat, dengan keberlanjutan program selanjutnya bergantung pada konsistensi masyarakat dalam merawat tanaman dan menjaga lingkungan secara mandiri.



Gambar 10 Pelaksanaan kegiatan penanaman dan gotong royong bersama masyarakat. Sumber: Dokumentasi KKN Sagara Karsa, 2026.

4.6 Ketercapaian Program dan Keberlanjutan

Secara keseluruhan, hasil pengabdian menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan berbasis potensi lokal dapat diterapkan melalui kombinasi pendampingan ekonomi, pemanfaatan lahan, dan kegiatan lingkungan. Pada program utama, 9 UMKM telah memperoleh pendampingan sesuai dengan kebutuhan usaha, meliputi legalitas NIB, sertifikasi halal, dan digitalisasi pembayaran melalui QRIS. Pada program pendukung, 1.000 bibit telah dipersiapkan melalui kegiatan penyemaian dalam Aksi Dapur Lestari, sementara kegiatan kelestarian lingkungan dilaksanakan melalui kolaborasi dan aksi bersama masyarakat. Selain program utama dan program pendukung tersebut, Kelompok Sagara Karsa juga melaksanakan dua bidang program tambahan, yaitu pendidikan dan literasi serta kesehatan. Pada bidang pendidikan dan literasi, kegiatan diarahkan pada pemberian pengetahuan dan pendampingan pembelajaran bagi peserta didik di lingkungan Desa Bojongemas. Sementara itu, pada bidang kesehatan dilaksanakan edukasi mengenai pencegahan HIV dan AIDS bagi masyarakat usia produktif sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kesehatan. Dalam evaluasi program pemberdayaan, capaian kegiatan perlu dibedakan antara output sebagai hasil langsung dari pelaksanaan program dan outcome sebagai perubahan yang muncul setelah masyarakat memanfaatkan hasil program tersebut (Harianja et al., 2026). Pendekatan evaluasi berbasis input–proses–output–outcome juga dapat digunakan dalam penelitian kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk melihat ketercapaian program secara kontekstual (Rusdianah & Hadi, 2020). Oleh karena itu, kegiatan KKN Sagara Karsa dapat dikategorikan telah menghasilkan output yang dapat diamati secara langsung selama pelaksanaan, sedangkan perubahan jangka panjang seperti peningkatan pendapatan UMKM, peningkatan ketahanan pangan, perubahan kondisi ekologis, peningkatan hasil belajar, maupun perubahan perilaku kesehatan belum dapat dinyatakan sebagai outcome yang terukur karena memerlukan pemantauan setelah program berakhir. Dengan demikian, capaian kegiatan dalam pengabdian ini lebih tepat dipahami sebagai hasil pelaksanaan program dan peningkatan kapasitas awal masyarakat, bukan sebagai bukti dampak jangka panjang yang telah terukur. Pendekatan tersebut sejalan dengan penelitian evaluasi program pemberdayaan yang menempatkan output dan outcome sebagai tahapan capaian yang perlu dibedakan dalam menilai keberhasilan suatu program.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat Kelompok KKN Sagara Karsa di Desa Bojongemas, Kecamatan Solokanjeruk, menunjukkan bahwa pemberdayaan berbasis potensi lokal dapat dilaksanakan melalui penguatan UMKM sebagai program utama yang didukung oleh program ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Pada aspek UMKM, pendampingan telah diberikan kepada 9 pelaku usaha melalui pendataan, pendampingan NIB, sertifikasi halal, proses produksi, serta digitalisasi pembayaran melalui QRIS. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesiapan pelaku UMKM dalam aspek legalitas, sertifikasi halal, dan adaptasi terhadap pembayaran digital. Pada program pendukung, Aksi Dapur Lestari menghasilkan 1.000 bibit tanaman sebagai tahap awal pemanfaatan lahan rumah tangga untuk mendukung ketahanan pangan, sedangkan kegiatan penanaman dan gotong royong mendorong interaksi, partisipasi, serta kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.

Kelebihan kegiatan ini terletak pada pendekatan pendampingan secara langsung, penyesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, serta adanya kolaborasi antara mahasiswa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lokal. Namun, kegiatan memiliki keterbatasan pada waktu pelaksanaan yang relatif singkat, yaitu satu bulan, sehingga dampak jangka panjang seperti peningkatan omzet UMKM, peningkatan ketahanan pangan, keberhasilan tanaman hingga masa panen, dan perubahan kondisi ekologis belum dapat diukur secara menyeluruh. Oleh karena itu, pengembangan selanjutnya perlu dilakukan melalui pendampingan dan monitoring pascaprogram, khususnya terhadap keberlanjutan legalitas dan sertifikasi halal UMKM, pemanfaatan QRIS, pemeliharaan bibit hingga masa panen, serta perawatan tanaman dan kegiatan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberlanjutan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, pelaku UMKM, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi penting agar hasil kegiatan tidak berhenti pada output selama KKN, tetapi dapat berkembang menjadi upaya pemberdayaan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan potensi lokal Desa Bojongemas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Desa Bojongemas, seluruh perangkat desa, Kelompok Kerja (Pokja), Karang Taruna, PKK, serta masyarakat Desa Bojongemas yang telah memberikan izin, dukungan, dan bantuan penuh dalam pelaksanaan seluruh program kerja. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Octavia Chandra Dewi, S.S., M.Hum. dan Muhammad Suryanuddin, S.T., M.T., atas bimbingan, arahan, dan pendampingannya selama kegiatan berlangsung, serta kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa Kelompok KKN Sagara Karsa Universitas Al-Ghifari atas kerja keras dan dedikasinya. Semoga seluruh jerih payah, tenaga, dan kontribusi yang telah diberikan dapat memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Desa Bojongemas.

DAFTAR REFERENSI

Jurnal:

- Anggara, A., & Rezki, R. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 15–25.
- Bank Indonesia. (2024). *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS): Pembayaran Digital Praktis dan Aman*.
- Cahyani, I., Febriani, D., & Rahayu, A. (2024). Pendampingan Akselerasi Halal UMKM Pangan melalui Sistem Self Declare. *Jurnal Aplikasi Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 90–101.
- Chelsea, O., & Suryasih, I. A. (2021). Pendekatan Deskriptif Kualitatif dalam Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Analisis Sosial*, 6(1), 33–44.
- Damayanti, R., Lestari, R., & Pratama, A. (2025). Pendampingan Sertifikasi Halal dan Transformasi Digital QRIS Bagi Pelaku Usaha Mikro. *Jurnal Riset Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 60–72.
- Harianja, E. S., Sidabutar, V. T. M., Lumbantoruan, M., & Malau, G. C. (2026). Evaluasi Program DASHAT Berbasis Input--Proses--Output--Outcome (IPOO) di Kelurahan Medan Sunggal Tahun 2024. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Dan Lingkungan Hidup*.
- Husen, A., Fajar, M., & Rahmat, A. (2025). Strategi Pendampingan Langsung Pengembangan UMKM Perdesaan. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Kreatif*, 4(1), 15–28.
- Lastfitriani, A., Rahmawati, D., & Kurniawan, A. (2024). Pendampingan Sertifikasi Halal bagi UMKM Makanan dan Minuman Scale Up. *Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 45–56.
- Nora, L., Suhendra, S., & Wahyuni, S. (2024). Hambatan Legalitas dan Sertifikasi Halal Usaha Mikro Kecil di Pedesaan. *Jurnal Hukum Dan Legalitas Usaha*, 2(3), 130–142.
- Nugroho, P., Utomo, B., & Susanto, A. (2023). Digitalisasi UMKM Melalui Penerapan QRIS untuk Peningkatan Literasi Keuangan Digital. *Jurnal Pengabdian Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 88–97.

- Prasetya, E., & Rahaju, T. (2024). Penguatan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat dalam Menciptakan Kemandirian Desa. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 5(2), 102–115.
- Qomariyah, N., Mahmudah, S., & Fitriana, N. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Urban Farming untuk Kemandirian Pangan. *Jurnal Ketahanan Pangan Perkotaan*, 3(2), 105–118.
- Radita, M., Wibowo, S., & Lestari, I. (2025). Pemanfaatan Lahan Pekarangan Rumah Tangga untuk Ketahanan Pangan Keluarga. *Jurnal Pertanian Berkelanjutan*, 7(1), 12–24.
- Raehanah, R., Fitriani, L., & Nurhasanah, S. (2024). Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Edukasi Sertifikasi Halal UMKM. *Jurnal Bakti Masyarakat*, 6(3), 210–220.
- Rusdianah, R., & Hadi, A. J. (2020). Evaluasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK): Studi Kasus di Tingkat Puskesmas. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*.
- Saputro, H., & Fidiyani, R. (2022). Optimalisasi Lahan Pekarangan dalam Menunjang Ketahanan Pangan Masyarakat Desa Gadingsari. *Jurnal Pengabdian Sosial Kemanusiaan*, 1(4), 150–162.
- Tanjung, R., Sadono, D., & Wibowo, A. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Program Pelestarian Lingkungan Desa. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan*, 19(1), 45–58.